



# Data Memadai Seluruh OPD Antar LKPD Kota Batu Lengkap dan Akuntabel

Kota Batu, Bhirawa  
Seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batu masing-masing telah mempersiapkan laporan keuangannya dengan lengkap.

Hal ini membuat pemkot mampu menyusun laporan keuangan dengan baik dan transparan. Dengan demikian saat diperiksa bisa menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang akuntabel.

Penjabat (Pj) Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai menjelaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan agenda tahunan. Dan semua OPD sudah memahami apa yang harus dikerjakan.

“Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Kota Batu, saya minta untuk bisa bersinergi dengan baik lagi dalam mengelola keuangan daerah,” ujar Aries AP, Rabu (6/3).

Diketahui, Pemkot Batu telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2023. Dan selaku Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai telah menyerahkan laporan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Saat penyerahan, Aries AP didampingi oleh Sekretaris Daerah Zadim Effisiensi, Inspektur Sugeng Mulyono, dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Eny Rachyuningasih. Aries memastikan bahwa pemerintah Kota Batu telah mempersiapkan laporan keuangannya dengan lengkap.



Pj Wali Kota Batu, Aries AP saat menyerahkan LKPD Unaudited 2023 ke BPK RI Perwakilan Jatim, Selasa (5/3).

LKPD Unaudited tahun 2023 Kota Batu diterima Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Karyadi. Hal ini ditandai dengan penan-

datanganan berita acara serah terima antara Pemkot Batu dan BPK.

Saat acara serah terima juga dihadiri oleh Pj Gubernur Jawa Timur

Adhy Karyono, Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Dr Ir H Ahmadi Noor Supit.

Penyerahan LKPD Unaudited 2023 ini adalah sebagai kewajiban yang dijamin sesuai Undang Undang Nomor 1 tahun 2004. Sesuai regula-

si ini Pemerintah Daerah wajib menyerahkan Laporan Keuangan Kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. [\[nas.dre\]](#)